

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NO. 37 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN GRATIS: *LESSON LEARNED* DI RSUD SUKADANA

Fatmi Nuryanti¹, Nurkholis Majid², Yuyun Fitriani^{3*}, Ita Prihantika⁴, & I Wayan Lendra⁵

^{1,2,3,5} Jurusan Ilmu Administrasi Negara, STISIPOL Dharma Wacana

⁴ Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Lampung

*Email: yuyunfitriani01.yf@gmail.com

ABSTRACT

Implementation of East Lampung Regent's Regulation No. 37 of 2019 concerning Guidelines for Implementing Free Health Services for the Community at Sukadana District Hospital is experiencing various problems ranging from the large number of people who do not yet know about the existence of free treatment due to lack of outreach to the limited budget provided by the East Lampung Regency government . The method in this research uses a qualitative method. Based on the research, it can be concluded that: (1) Guidelines for the Implementation of the Free Health Service Program for the Community of East Lampung at the Sukadana Hospital, East Lampung Regency, have not run according to expectations and have not been achieved optimally. (2) Sukadana Regional Hospital as the medical health facilitator appointed by the East Lampung district government already has adequate facilities and infrastructure, but Sukadana Regional Hospital must also approach the community so that the community understands and understands the Community Health Service Program for the East Lampung community.

Keywords: *ideal policy, target group, organization, environment factor*

ABSTRAK

Implementasi Peraturan Bupati Lampung Timur No.37 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Masyarakat Di RSUD Sukadana mengalami berbagai permasalahan mulai dari masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui tentang adanya berobat gratis karena kurangnya sosialisasi hingga terbatasnya anggaran yang di sediakan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Metode dalam Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa : (1) Pedoman Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Masyarakat Lampung Timur Di RSUD Sukadana Kabupaten Lampung Timur, belum berjalan sesuai dengan harapan dan belum tercapai secara maksimal. (2) RSUD Sukadana selaku fasilitator kesehatan pengobatan yang di tunjuk oleh pemerintah kabupaten lampung timur sudah memiliki sarana dan prasarana yang memadai namun RSUD Sukadana juga harus melakukan pendekatan kepada masyarakat agar masyarakat paham dan mengerti tentang Program Layanan Kesehatan Masyarakat bagi masyarakat lampung timur.

Kata kunci: kebijakan yang diimpikan, kelompok sasaran, organisasi pelaksana, faktor lingkungan

PENDAHULUAN

Pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan kesehatan yang menjadi salah satu hak mendasar masyarakat sebagaimana telah diamanatkan dalam

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) dan ayat (3) : “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh

pelayanan kesehatan” dan “Setiap orang berhak atas Jaminan Sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat” (Hasrillah & Cikusin, 2019).

Kesehatan merupakan bagian penting dari kesejahteraan masyarakat, Kesehatan juga merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia disamping sandang, pangan, dan papan. Dalam kehidupan manusia mempunyai sebuah kesehatan dimana seseorang merasa baik dengan fisik dan mentalnya lebih tepatnya sehat yaitu suatu kondisi yang bebas dari berbagai jenis penyakit baik secara fisik, mental, maupun sosial. Konsep Sehat adalah keadaan normal yang sesuai dengan standar yang diterima berdasarkan kriteria tertentu, sesuai jenis kelamin dan komunitas masyarakat sekitarnya.

Rumah sakit sebagai fasilitas kesehatan diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Dimana para petugas atau tenaga kesehatan Rumah Sakit (dokter dan perawat) mempunyai peran dan tanggung jawab yang besar mengenai masalah kesehatan masyarakat. Terutama dalam hal pelayanan kesehatan yang bermutu kepada masyarakat. Pemberian pelayanan kesehatan yang bermutu akan memberikan kepuasan bagi masyarakat (Karim & Moenta, 2018).

Secara umum yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan adalah segala upaya dan kegiatan pencegahan dan pengobatan penyakit. Semua upaya dan kegiatan meningkatkan dan memulihkan kesehatan yang dilakukan oleh petugas kesehatan dalam mencapai masyarakat yang sehat (Wulandari et al., 2016). Pelayanan kesehatan sangat erat

kaitannya dengan pembiayaan yang tinggi. Biaya kesehatan adalah besarnya dana yang harus dikeluarkan untuk menyelenggarakan atau untuk memanfaatkan berbagai layanan kesehatan yang diperlukan oleh individu, keluarga kelompok atau masyarakat. Selain biaya pengobatan dibutuhkan juga biaya untuk mencapai fasilitas kesehatan seperti biaya transportasi dan akomodasi yang juga membutuhkan biaya yang tinggi (Susyanty et al., 2017). Pola pembiayaan kesehatan yang umum digunakan di Rumah Sakit adalah dengan sistem prabayar tidak terkecuali di RSUD Sukadana. Sistem pra bayar adalah Bentuk jaminan pemeliharaan kesehatan prabayar yang dikenal di masyarakat dengan beberapa jenis, yakni: kartu sehat, dana sehat, jamkesmas, askes, jamsostek, BPJS, dan lain-lainnya. Namun sebagian besar masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan belum memiliki jaminan kesehatan karena menilai jaminan kesehatan tersebut memberatkan karena harus membayar iuran wajib setiap bulan. Untuk itu perlunya bantuan dari pemerintah daerah kabupaten Lampung Timur untuk mengatasi masalah kesehatan masyarakat yang kurang mampu dan tidak mempunyai kartu jaminan kesehatan.

Di Kabupaten Lampung Timur sendiri, upaya peningkatan pelayanan kesehatan diatur dalam Peraturan Bupati Lampung Timur No. 37 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Masyarakat Lampung Timur di RSUD Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Maksud dari dibuatnya peraturan ini adalah sebagai pedoman bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan gratis (unit gawat darurat, rawat

jalan/poliklinik spesialis, rawat inap, korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), korban bencana alam, korban Kejadian Luar Biasa (KLB), pasien anonim, pasien sebagai akibat tindakan dalam upaya pemberantasan kejahatan dan pasien penghuni Rumah Tahanan Sukadana) di RSUD Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Latar belakang dibuatnya Peraturan Bupati Lampung Timur No. 37 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Masyarakat Lampung Timur di RSUD Sukadana Kabupaten Lampung Timur adalah untuk menutupi pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang tidak memiliki kartu jaminan kesehatan. Untuk mendapatkan layanan kesehatan secara gratis masyarakat harus memenuhi beberapa persyaratan sesuai dengan program atau layanan yang akan diambil. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat berdasarkan prosedur pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Lampung Timur seperti: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik, Fotokopi Kartu Keluarga (KK), Mengisi surat keterangan bebas biaya yang telah disediakan oleh RSUD Sukadana, Bukti pelayanan di Unit Gawat Darurat (UGD), Rujukan dari puskesmas tempat tinggal, dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kepala desa atau kelurahan yang diketahui oleh Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) atau camat setempat. Persyaratan tersebut disesuaikan dengan jenis layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat/pasien. Jenis layanan yang dapat diterima secara gratis di RSUD Sukadana adalah program Unit Gawat Darurat (UGD) gratis, program pelayanan rawat jalan, program pelayanan

rawat inap, program pelayanan ambulan, korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perempuan korban kekerasan seksual, korban bencana alam dan kejadian luar biasa, dan pasien sebagai akibat tindakan aparat kepolisian dan penghuni lembaga pemasyarakatan.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan desain pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini berdasarkan pada landasan teoritis fenomenologi sehingga sesuai untuk menggambarkan dan mendapatkan pemahaman dalam menganalisis implementasi kebijakan pelayanan kesehatan gratis di Kabupaten Lampung Timur (Moleong, 2014). Fokus dalam penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan menurut Quade dalam Akib (2010) yakni: (1) kebijakan yang diimpikan; (2) kelompok target; (3) organisasi yang melaksanakan; (4) faktor lingkungan (Akib, 2010). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan metode.

PEMBAHASAN

Kebijakan yang Diimpikan

Sehubungan dengan isi kebijakan program kesehatan gratis di Kabupaten Lampung Timur secara politis mempunyai kepentingan memberdayakan masyarakat khususnya masyarakat miskin dalam menerima akses pelayanan kesehatan secara gratis, juga kepentingan lain untuk isu-isu

politik dalam pelaksanaan program pembangunan khususnya bidang kesehatan. Maka isi kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan kelompok sasaran dipengaruhi banyaknya penerima kepentingan sehingga implementasi program ini semakin sulit diimplementasikan. Karena salah satu hak yang sangat penting di masyarakat adalah mendapatkan pelayanan kesehatan walaupun tidak mempunyai biaya, karena negara mempunyai kepentingan yang sangat besar untuk memenuhi pelayanan kesehatan. selanjutnya untuk memenuhi pelayanan kesehatan tersebut maka pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat wajib untuk menjabarkan atau meneruskan kebijakan tersebut agar semua masyarakat mendapat akses pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin menjadi wajib hukumnya di programkan pemerintah daerah, dengan catatan perlu pengelolaan dan perhitungan-perhitungan yang profesional agar program ini bukan hanya menjadi kepentingan sesaat saja.

Bagi masyarakat awam yang kurang mampu atau ekonomi lemah, program kesehatan gratis adalah harapan yang besar untuk mereka dapatkan, dalam hal ini kebijakan menggratiskan biaya pengobatan adalah kepentingan utama untuk masyarakat miskin. Sedangkan untuk masyarakat Kabupaten Lampung Timur secara umum program ini mendapat perlakuan yang berbeda ketika mendapatkan pelayanan di berbagai fasilitas milik Pemerintah Daerah. Sementara disisi lain beban kerja dan anggaran meningkat disebabkan permintaan pelayanan kesehatan yang tinggi.

Adapun mekanisme yang dilakukan ketika ingin memperoleh pelayanan yang gratis yaitu mengambil surat keterangan kurang mampu bagi masyarakat yang kurang mampu di Kantor Camat yang bersangkutan, untuk melakukan rujukan di PUSKESDES yang bersangkutan pula, kemudian melakukan rujukan di Rumah Sakit Daerah yang ingin ditempati untuk melakukan pemeriksaan atau pengobatan. Namun dalam hal ini yang ditanggung oleh pemerintah berdasarkan PERBUP No. 37, untuk tidak dipungut biaya dalam memperoleh pengobatan yaitu Pelayanan tingkat dasar, Pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk Kota di Puskesmas dan Jaringannya dibebaskan dari biaya pengobatan meliputi:

1. Pelayanan rawat inap persalinan dan rawat inap umum.
2. Pemeriksaan dokter, pengobatan, dan konsultasi kesehatan.
3. Pelayanan laboratorium yang terdiri dari;
 - a) tindak medik umum
 - b) Tindakan medik gigi mulut dasar
4. Pelayanan dasar Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Keluarga Berencana (KB)
5. Pelayanan kesehatan rawat jalan lanjutan dan pelayanan kesehatan rawat inap selanjutnya pada RSUD dibebaskan dari biaya rawat jalan dan rawat inap kelas III setelah mendapatkan surat rujukan dari Puskesmas.

Oleh karena itu, kebijakan yang di impikan dalam hal ini adalah terwujudnya pelayanan kesehatan gratis di Kabupaten Lampung Timur sulit untuk diwujudkan dengan baik. Menurut Quade (2013) kebijakan yang diimpikan dapat diartikan sebagai pola interaksi yang diimpikan agar

orang yang menetapkan kebijakan berusaha untuk mewujudkan. Dalam proses implementasi kebijakan pengobatan gratis di RSUD Sukadana banyak mendapat kritik dan keluhan dari masyarakat, serta para pelaksana di lapangan, karena sering dijumpai kekurangan dan kelemahan dari berbagai bentuk pelayanan kesehatan, walaupun bagi masyarakat miskin, program ini dapat membantu meringankan beban pembiayaan. Dalam hal kepesertaan misalnya, karena tidak tegas dari sisi administrasi kepesertaan maka permintaan pelayanan kesehatan tidak bisa terbendung jumlahnya, artinya target sasaran yang semakin sehingga kebijakan semakin sulit diimplementasikan.

Kelompok Target

Kelompok target yaitu subyek yang diharapkan dapat mengadopsi pola interaksi baru melalui kebijakan dan subyek yang harus berubah untuk memenuhi kebutuhannya; Pelayanan yang diberikan dari kebijakan Pemerintah bagi penerima pelayanan kesehatan gratis yaitu dibebaskan dari biaya rawat jalan dan rawat inap kelas III setelah mendapatkan surat rujukan dari Puskesmas. Dalam hal ini masih banyak masyarakat yang tidak paham tentang pelayanan yang diberikan, karena ketika masyarakat menggunakan pelayanan kesehatan gratis, kadang mereka menginginkan pelayanan yang lebih maksimal, dari pelayanan kesehatan gratis yang disediakan oleh pihak Rumah Sakit maupun Pihak Pemerintah sendiri. Terkadang masyarakat kurang puas terhadap pelayanan kesehatan gratis yang diberikan. Itu karena tidak pahamnya mengenai kesehatan gratis, apa-apa saja yang digratiskan dalam kebijakan pemerintah itu.

Hal ini muncul karena kurangnya sosialisasi ditingkat masyarakat, terutama dikalangan masyarakat miskin. Dan seharusnya pemerintah memberikan sosialisasi dan pemahaman di tingkat masyarakat agar masyarakat lebih mengetahui kebijakan pelayanan kesehatan yang ada. Adapun pelayanan yang diberikan yaitu:

1. Pelayanan rawat inap persalinan dan rawat inap umum;
2. Pemeriksaan dokter, pengobatan, dan konsultasi kesehatan;
3. Pelayanan laboratorium yang terdiri dari;
4. Pelayanan dasar Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Keluarga Berencana (KB);
5. Surat keterangan lahir;
6. Surat keterangan sakit;
7. Surat keterangan kematian;
8. Pelayanan kesehatan rawat jalan lanjutan dan pelayanan kesehatan rawat inap;
9. Selanjutnya pada RSUD dibebaskan dari biaya rawat jalan dan rawat inap kelas III setelah mendapatkan surat rujukan dari Puskesmas.

Organisasi yang Melaksanakan

Organisasi yang melaksanakan yaitu biasanya berupa unit birokrasi pemerintah yang bertanggungjawab mengimplementasikan kebijakan. Dalam mengimplementasikan program kesehatan gratis RSUD Sukadana dalam mengimplementasikan suatu kebijakan agar dapat terealisasi dengan baik, perlu adanya dukungan serta adanya peran pemerintah yang menunjang dalam penyediaan sarana dan prasarana serta Sumber daya Manusia yang memadai. Karena dalam implementasi program dibutuhkan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang ada cukup

memadai untuk menjalankan program dengan baik. Sehingga yang masyarakat ketahui hanyalah program Ambulance gratis saja, sedangkan ada banyak layanan pemerintah yang gratis yaitu program Unit Gawat Darurat (UGD) gratis, program pelayanan rawat jalan, program pelayanan rawat inap. Program Layanan Kesehatan Masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dapat dapat dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah suatu perubahan atau transformasi yang diterapkan melalui strategi implementasi kebijakan yang terkait berbagai lapisan masyarakat (Hariyati et al., 2019).

Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan yaitu elemen dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Kondisi sosial ekonomi masyarakat sangat berpengaruh terhadap implementasi program Kesehatan Masyarakat. Masyarakat yang sudah terdidik relatif mudah dalam menerima suatu informasi terbaru dibandingkan masyarakat yang tertutup dan tradisional, kemajuan teknologi akan membantu proses keberhasilan implementasi program, karena program-program tersebut dapat disosialisasikan melalui teknologi modern. Perlunya peningkatan jumlah Sumber daya Manusia nya agar dapat membantu keberhasilan Program Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Lampung Timur, baik dari RSUD Sukadana Maupun dari Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Menurut Grindle (1980: 10) dan Quade (1984: 310) dalam Simatupang bahwa yang diperlukan dalam implementasi kebijakan

adalah adanya konfigurasi dan sinergi dari tiga variabel yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan atau program, yakni hubungan segi tiga variabel kebijakan, organisasi, dan lingkungan kebijakan. Harapan itu perlu diwujudkan agar melalui pemilihan kebijakan yang tepat masyarakat dapat berpartisipasi dalam memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan (Simatupang & Akib, 2015).

PENUTUP

Dalam Implementasi Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Masyarakat Lampung Timur Di RSUD Sukadana Kabupaten Lampung Timur, belum berjalan sesuai dengan harapan dan belum tercapai secara maksimal. RSUD Sukadana selaku fasilitator kesehatan pengobatan yang di tunjuk oleh pemerintah kabupaten Lampung Timur sudah memiliki sarana dan prasarana yang memadai namun RSUD Sukadana juga harus melakukan pendekatan kepada masyarakat agar masyarakat paham dan mengerti tentang Program Layanan Kesehatan Masyarakat bagi masyarakat Lampung Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1–11.
- Hariyati, N. & Pangaribuan, E. N. (2019). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SMP di Kabupaten Gresik. *Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 7(1), 1–12.
- Hasrillah & Cikusin, H. Y. (2021). Implementasi Pelayanan Kesehatan

- Masyarakat melalui Program BPJS Kesehatan. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(12), 2869–2882.
- Karim, M. I. T., Moenta, A. P. M. R. (2018). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Kesehatan Masyarakat Melalui Jaminan Kesehatan Nasional. *Amanna Gappa*, 26(1), 53–63.
<https://doi.org/10.20956/halrev.v3i2.1050>
- Moleong, M. L. J. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: *Remaja Rosdakarya*.
- Simatupang, P., & Akib, H. (2015). Efektivitas Implementasi Dan Dampak Kebijakan Dalam Konteks Desentralisasi Pemerintahan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 2(1), 1.
<https://doi.org/10.26858/jiap.v2i1.871>
- Susyanty, A. L., Handayani, R. S., & Sugiharti, S. (2017). Keterjangkauan Biaya untuk Mendapatkan Pengobatan pada Anak dengan HIV AIDS dan Infeksi Oportunistik. *Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan*, 27(3), 161–168.
<https://doi.org/10.22435/mpk.v27i3.6773.161-168>
- Wulandari, C., Ode, L., Imran, A., & Syawal, A. (2016). Faktor yang Berhubungan dengan Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Langara Kecamatan Wawonii Barat Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Unsyiah*, 1–8.
<https://www.neliti.com/publications/183311/faktor-yang-berhubungan-dengan-pemanfaatan-pelayanan-kesehatan-di-uptd-puskesmas>